

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/334767590>

Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan)

Article in *ATESTASI Jurnal Ilmiah Akuntansi* · September 2018

DOI: 10.33096/atestasi.v1i1.39

CITATIONS

9

READS

673

3 authors, including:



Jamaluddin Majid

Universitas Islam Negeri Alauddin

46 PUBLICATIONS 24 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



determinan demografi sosiologi financial and economic for acuntability [View project](#)

Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value For Money* dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik

(Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan)

Sayuti Sayuti¹ Jamaluddin Majid² Muhammad Sapril Sardi Juardi³

Email Author :

sayutiuti128@gmail.com¹ jamal.majid@uin-alaududin.ac.id²

sapril.sardi@uin-alaududin.ac.id³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan *Value For Money* dalam pengelolaan keuangan akuntansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep *Value For Money* terhadap kinerja dari program kerja yang telah dilaksanakan. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah salah satu Lembaga pemerintah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Metode pengambilan data yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), wawancara langsung dengan informan, studi pustaka dan internet searching. Wawancara dilakukan dengan pihak internal. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa perwujudan nilai transparansi sudah diterapkan dengan adanya keterbukaan informasi dan proses nilai akuntabilitas pertanggungjawaban terhadap publik dan pemerintah sesuai dengan aturan, dalam proses pengelolaan keuangan akuntansi dengan menggunakan sistem yang berbasis akrual, konsep *Value For Money* cukup ekonomis, efisien dan efektif di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kata Kunci : Transparansi; Akuntabilitas; Nilai untuk uang

ABSTRACT

This study aims application the values of transparency, accountability and value for money in the accounting financial management of Agency Regional Development Planning (BAPPEDA) kabupaten gowa. Beside that, research this aim for knowing application the concept of value for money on the performance of the work program that has been implementation. Objects research in research this is wrong one institute government namely the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA), Method data retrieval (*field research*), interview directly with informants, studies library dan internet searching, interview do with internal parties. Results research this obtained that per manifestation of the value has been applied to the disclosure of information and the value of accountability to the public and the government in accordance with the rules, in the process of financial management accounting by using a system of accrual, the concept of value for money is quite economical, efficient, effective in Agency Regional Development Planning (BAPPEDA) kabupaten Gowa corresponding with rules that have been set by government.

Keyword : Transparency; Accountability; Value for money

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), adanya pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak. Pertiwi (2015:2) mengungkapkan bahwa *good governance* yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek akuntansi adalah transparansi dan akuntabilitas (Suryo, 2008). Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi sehingga adanya tuntutan baru agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu; ekonomi, efisiensi, dan efektivitas Mardiasmo (2002:4).

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan segala urusan pemerintahan dapat optimal. Auditya (2013:24) berpendapat bahwa pengukuran kinerja pemerintah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Khusus organisasi publik berkaitan erat dengan produktifitas, kualitas, layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, serta persamaa pelayanan. Kurniawan (2003:2) mengemukakan bahwa, transparansi terwujud apabila pemerintah bersedia untuk menginformasikan kepada masyarakat/DPRD bagaimana dana publik digunakan atau dikelola dalam kegiatan dan program pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Hadyrianto (2012:7) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, dan Transparansi pada Pengelolaan Anggaran di Universitas Bina Nusantara, menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran. Dasar penulis untuk melakukan penelitian pada BAPPEDA Kabupaten Gowa adalah untuk melihat dan menganalisa keterbukaan informasi (Transparansi) dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pengelolaan anggaran telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif (*Value for money*).

Tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas publik (public accountability) pada era reformasi membawa dampak terhadap dalam proses pengembangan manajemen pemerintahan di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas publik merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Transparansi dan akuntabilitas publik kini menjadi kajian yang marak, penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang partisipatif sebagai suatu konsekuensi logis. Isu seputar transparansi dan akuntabilitas tidak terlepas dari maraknya penyalagunaan wewenang dan penyelewengan dana oleh oknum pegawai maupun pejabat pemerintahan. Pemerintah daerah dituntut mampu mengelola keuangannya dengan prinsip pengukuran kinerja (Nugrahani, 2007).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Nana Sudjana (2009:07) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan dekskripsi dan analisis tentang kegiatan, proses atau peristiwa-peristiwa penting. Analisa kualitatif itu sendiri, terdiri atas pengukuran data yang dibuat berdasarkan pada pandangan sementara yang dibentuk secara spesifik. Berdasarkan tujuan yang ada penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi realitas.

Chariri (2009:05) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif akan melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami sesuatu dan menambahkan bahwa tujuan dari penelitian deskritif adalah untuk menghasilkan pandangan-pandangan dan penjelasan tentang peristiwa sosial tertentu sehingga peneliti mampu mengungkap sistem interpretasi dan pemahaman (makna) yang ada dalam lingkungan sosial. Penelitian ini akan dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang beralokasi di Jl.Tamanurung Raya No. 45, Sungguminasa,Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan Kode pos 92114, Telepon (0411) 889055.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode ini menganalisa data yang diperoleh dengan membuat pernyataan atau kalimat setelah itu membandingkan dengan teori yang sudah ada. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang di peroleh

melalui responden penelitian berupa informan yang di wawancarai dan data dokumenter. Informan yaitu orang yang akan memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki kompetensi dalam mengetahui operasional pada BAPPEDA Kab. Gowa serta peraturan-peraturan yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yaitu dengan melakukan survei (wawancara dengan menggunakan alat perekam) terhadap suatu obyek secara langsung sebagai informan penelitian. Dokumen dalam penelitian ini berupa kata-kata dan gambar yang mampu mempercepat proses penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis data yang digunakan berdasarkan kepada jenis data yang diperoleh selama penelitian. Untuk jenis data yang diperoleh berdasarkan observasi dan wawancara yang akan dikembangkan. Proses analisis data dari hasil observasi dan wawancara ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pemerintah daerah mewujudkan nilai – nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik.

Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri, Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu laporan keuangan yang disusun pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna. Serta kemampuan staff atau aparatur pemerintahan dalam transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap masyarakat pernyataan informan Ibu Susanti sebagai sekretaris BAPPEDA mengungkapkan bahwa :

“Kami disini bentuk ketebukaan dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan memang harus secara benar, jujur dalam pengelolaan keuangan dan harus sesuai dengan standar pemerintahan. sekarang pelaporan keuangannya juga menggunakan sistem mi (penekanan dalam bahasa bugis) terus sudah terpercayami juga karena semua terprogram langsung melalui IT yang di sediakan pemerintah. Dapatki juga mencegah kecurangan.”

Dari hasil pernyataan informan bahwa penyusunan laporan keuangan yang harus jujur suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Dengan adanya sistem yang terprogram langsung melalui IT maka hasil dari laporan keuangan terpercaya atau terintegrasi dapat mencegah kecurangan . Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan, pelaksanaannya.

Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami mencegah timbulnya penyimpangan tindakan aparatur publik. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan, transparansi mengisyaratkan bahwa laporan keuangan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah menjalankan amanat rakyat. Tidak semua dari golongan masyarakat mengerti dengan IT pernyataan informan Ibu Jusni sebagai bendahara pengeluaran mengungkapkan sebagai berikut:

“Kalau menurutku sih, memang benar karena sebagian golongan apalagi menengah ke bawah biasanya tidak bisa mengakses informasi melalui komputer karena banyak faktor entah tidak sekolah atau memang betul gagal teknologi, jadi upaya kami disini eeh (terbata-bata dalam pengucapan kalimat) yaitu menyediakan papan pengumuman terkait dengan penganggaran dan program-program kerja yang akan kami lakukan. Kalau yang bisa mengakses terkait rencana kegiatan anggaran bisa langsung membuka website yang kami sediakan.”

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi golongan masyarakat yang tidak paham teknologi masa kini telah di sediakan papan pengumuman terkait penyelenggaraan program – program kerja dan untuk itu masyarakat di beri akses

melalui membuka website yang di sediakan. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah. Dalam mendukung terwujudnya *good governance* masyarakat sebagai salah satu alat untuk mendorong berjalannya prinsip-prinsip *good governance*. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat harus dibuat secara terbuka. Serta adanya sosialisasi pengetahuan teknologi atau *e government* kepada masyarakat umum yang masih belum paham dengan IT.

Akuntabilitas publik keuangan daerah adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan daerah kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sehingga hak-hak publik, yaitu hak untuk tau (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be kept information*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) dapat terpenuhi. Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasilguna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini. Hal tersebut sesuai dengan *Agency Theory* yang membahas kontrak antara *principal* dan *Agen*. Jensen dan Meckling (1976:1) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agent, sehingga agent tidak selamanya mengikuti keinginan prinsipal. Hubungan keagenan tersebut juga terjadi di pemerintahan antara rakyat sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Hal ini sejalan dengan yang di ungkapkan oleh Ibu Jusni sebagai bendahara pengeluaran BAPPEDA bahwa:

“Kalau disini, bentuk pengawasan oleh masyarakat dengan ikut berpartisipasi dalam proses penganggaran dan dalam rapat keluhan atau masukkan akan kami jadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan supaya to’(penekanan kata) sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

Pernyataan informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai prinsipal memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap agen atau pemerintah dalam pengelolaan keuangan demi kesejahteraan principal. *Theory agency* dapat digunakan untuk menghubungkan tanggungjawaban sektor publik dimana masyarakat berperan

sebagai pemberi amanah sekaligus pemilik dan pelanggan (*customer*) dan tugas pemerintah daerah dengan peran dan fungsi sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat (*civil service*).

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah maka pemerintah daerah kabupaten gowa menerapkan akuntansi berbasis akrual tahun 2016. dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi tersebut, badan perencanaan pembangunan daerah selaku bagian dari pemerintah daerah kabupaten gowa menyusun laporan keuangan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kredibilitasnya yang pada gilirannya dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan mengungkapkan secara penuh kegiatan yang ada dengan sumber daya yang menunjukkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarnya informasi operasi atau kegiatan. Dalam sektor komersial, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Laba Rugi. Sedangkan dalam akuntansi pemerintah, laporan sejenis ini diciptakan dalam bentuk Laporan Operasional atau Laporan Surplus/Defisit. Dengan demikian, perbedaan kongkrit yang paling memerlukan perhatian adalah jenis/komponen laporan keuangan.

Perbedaan mendasar SAP PP 24/2005 dengan SAP Akrual terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Entitas pemerintah melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan. Dan monitoring dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan dalam pengelolaan keuangan menurut informan Pak Emil sebagai kasubid pembiayaan pembangunan mengungkapkan bahwa:

“Hmm (ragu-ragu) pengawasan dilakukan memang sih (penekanan kata) Setiap bulan melalui laporan keuangan yang di sampaikan ke manajemen melalui RKA ke pemerintah. proses monitoring tersebut dilaksanakan Setiap bulan kepala keuangan

melaporkan ke pemerintah. Pemerintah melalui laporan pertanggung jawaban keuangan yang disampaikan triwulan, semester, dan tahunan dengan melakukan pengecekan langsung terhadap pengelolaan keuangan yang dialokasikan dalam anggaran.”

Sedangkan Informan Ibu Susanti sebagai sekretaris BAPPEDA mengungkapkan bahwa:

“Kalau kami dalam penyusunan anggaran menggunakan sistem PPBS (Planning Programming Budgeting System). PPBS merupakan perencanaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan program atau kegiatan.”

Dari pernyataan informan Pak Emil dan Ibu Susanti dapat disimpulkan bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan dilakukan monitoring/pengawasan terhadap laporan keuangan yang dialokasikan dalam anggaran dan dalam penyusunan anggaran menggunakan sistem PPBS yang mempermudah kegiatan dalam proses laporan penganggaran yang lebih akurat dan terpercaya yang telah di sesuaikan dengan kebutuhan – kebutuhan program yang akan dilaksanakan. Pada dasarnya tujuan pengawasan adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi.

Penerapan konsep value for money dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

Secara umum kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi (Indra Bastian 2006 : 274). Namun menurut PP No. 8 Tahun 2006, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dengan demikian kinerja mencerminkan hasil atau prestasi kerja yang dapat dicapai oleh seseorang, unit kerja, dan atau suatu organisasi pada periode tertentu sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam upaya mencapai tujuan secara legal serta sesuai moral dan etika.

Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money* yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan

sasaran. Seperti yang di ungkapkan Ibu Jusni sebagai bendahara pengeluaran BAPPEDA mengungkapkan bahwa :

“kami disini pengukuran ekonomi, efisien, efektifitas dalam peningkatan kinerja dengan melihat proses penganggaran sampai hasil yang di targetkan sesuai dengan tujuan kegiatan yang dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Intinya itu, pegawai harus paham pada tugas pokok dan fungsi masing-masing agar kinerjanya bisa lebih baik”

Pernyataan di atas dapat simpulkan bahwa dalam pengukuran kinerja mampu menekan biaya dan mendapatkan hasil yang berkualitas dalam proses penganggaran secara ekonomi, efisien, efektifitas. Kegiatan yang dilaksanakan dan kemahiran pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya meningkatkan kinerjanya. Hasil yang diperoleh dari kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara nyata langsung dirasakan manfaatnya dari program kerjanya. Sebagai organisasi publik yang segala kegiatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak berorientasi pada laba melainkan memanfaatkan dana sebaik mungkin.

Keterkaitan transparansi, akuntabilitas, dan konsep value for money dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik.

Dalam pengelolaan keuangan daerah didasari oleh tiga prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, *value for money*. transparansi bahwa setiap golongan masyarakat memiliki hak dan akses yang sama dalam proses anggaran dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya partisipasi dapat mendukung kinerja organisasi publik. Akuntabilitas terkait pertanggungjawaban anggaran dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan dan konsep *value for money* pengukuran kinerja dalam proses penganggaran dari sisi ekonomi semua kegiatan program kerja dapat menekan biaya tidak terjadi pemborosan dana, sisi efisien penggunaan anggaran dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal, dan sisi efektif penggunaan anggaran harus sesuai visi misi mencapai target manfaatnya bisa dirasakan sesuai dengan tujuan kepentingan masyarakat. Keterkaitan antara transparansi, akuntabilitas, dan konsep *value for money* dalam proses penganggaran yaitu informan Pak Emil sebagai kasubid pembiayaan pembangunan BAPPEDA mengungkapkan bahwa:

“Hmm (ragu-ragu) kalau sepengetahuan saya itu transparansi yaitu keterbukaan informasi anggaran ta terbuka jie (penekanan bahasa daerah) bisa di ketahui

masyarakat juga. Kalau akuntabilitas yaitu memang betul – betul melaporkan anggaran yang telah di keluarkan terus dapatki juga pertanggungjawaban ki nantinya ke masyarakat konsep value money ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif

Value for money dan akuntabilitas yaitu suatu cara untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi dalam penelitian ini yaitu untuk meningkatkan yaitu pelayanan publik Pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan tanpa adanya keluhan dari masyarakat. Dengan adanya konsep *value for money* sangat berguna karena dengan diterapkannya dapat mencegah terjadinya pemborosan dana publik sehingga dapat meningkatkan kinerja serta kepercayaan masyarakat juga meningkat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana masyarakat yang mendasarkan konsep VFM, maka diperlukan sistem pengelolaan kedanaanggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (*performance budget*). Anggaran kinerja tersebut adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik pemerintah daerah dalam rangka otonomi dan desentralisasi. menyarankan bahwa sistem anggaran daerah sebaiknya mempunyai karakteristik 1) Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. 2) Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*). 3) Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran. 4) Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan. 5) Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait. 6) Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip. Hal ini harus di dukung dengan adanya anggaran dengan partisipasi masyarakat dan pengawasan.

Berikut pernyataan informan Pak Emil sebagai kasubid pembiayaan pembangunan BAPPEDA dengan mengemukakan bahwa :

“Hmm (penekanan kata artinya ragu-ragu) memang di sini dibutuhkan partisipasi masyarakat sangat penting dalam perumusan perancangan anggaran. masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Masyarakat tetap mendampingi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran sampai tahap akhir yaitu ikut mengevaluasi laporan realisasi dan pertanggungjawaban anggaran telah dilaksanakan dari media informasi

yang disediakan pemerintah daerah tetap mengadakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan.”

Hal ini senada dengan Ibu Jusni sebagai bendahara pengeluaran BAPPEDA mengungkapkan bahwa :

“Kalau disini to’ (itu) bentuk partisipasi masyarakat itu melalui keluhan-keluhan masyarakat kami dengar masalah-masalah apa saja yang di hadapi masyarakat kami kumpulkan dan dituangkan melalui rapat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.”

Dari pernyataan informan antara Pak Emil dan Ibu Jusni di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat berguna dalam proses penganggaran karena dengan adanya partisipasi akan mudah dalam pengambilan keputusan terkait anggaran dana publik dan adanya pengawasan langsung oleh masyarakat sehingga dapat mencegah penyimpangan/kecurangan dalam proses penganggaran. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian, suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Ukuran kinerja pemerintah daerah berdasarkan anggaran berbasis kinerja dapat diukur menggunakan konsep *value for money*, yakni ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat mengambil kesimpulan bahwa perwujudan nilai nilai transparansi dalam pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sudah baik, yaitu adanya keterbukaan informasi dan adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam proses penganggaran. Perwujudan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan akuntansi yang sistem berbasis akrual telah di implementasikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Serta bentuk pertanggungjawaban

dalam program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Penerapan konsep *value for money* dalam peningkatan kinerja BAPPEDA dilihat dari program-program kerja yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja sebagian besar program kegiatannya berjalan ekonomis dan hanya 1 program dengan kategori cukup ekonomis hasil yang diperoleh dikatakan ekonomi karena sesuai target tidak terjadi pemborosan. pengukuran kinerja cukup efisien 1 program kerja hanya 3 program kerja yang efisien sedangkan 10 program dalam kategori kurang efisien ini akibat dari biaya anggaran tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan penghematan terjadi tetapi hanya sedikit program kerja yang efisien dan tidak memanfaatkan dana secara baik, suatu kinerja program di katakan efisien mendapatkan output penggunaan sumber daya dan dana serendah-rendahnya. Pengukuran kinerja dari efektifitas program kerja dikatakan cukup efektif karena dari 13 program kerja. 11 program kerja kategori efektif sesuai target 1 program kerja kurang efektif tetapi ada 1 program kerja tidak efektif karena masih ada kegiatan dari program kerja tidak terlaksana. Dikatakan efektif apabila semua program kerja serta kegiatan-kegiatan dari program kerja tersebut terlaksana sesuai hasil atau target yang diinginkan.

REFERENSI

- Afiyanti, Yati. 2008. Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Keperawatan Indonesia. 12(2): 137-141.
- Anugriani, Rezky Mulya. 2014. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar
- Ardhiarisca, Oryza. 2012. Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Jember.
- Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Universitas Setia Budi Surakarta. Jurnal Riset Akuntansi. 1 (1) : 1-14.
- Asrida. 2012. Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bireuen. Jurnal Kebangsaan. 1(1) : 2-40.
- Auditya, Lucy., Husaini, dan Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Fairness. 3(1) : 21-41.
- Bastian, Indra. 2002. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
- Chariri, Anis. 2009. Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Paper disajikan pada workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA): UNDIP Semarang.

- Hadyrianto, Pahala. 2012. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran di Universitas Bina Nusantara. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Nusantara, Jakarta
- Harun. 2009. Reformasi Akuntansi Dan Manajemen Sektor Publik Di Indonesia . Jakarta: Salemba empat.
- Jensen, M. C., and W. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics* 3: 305-360.
- Kurniawan. 2009. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah IV Priangan. Skripsi UPI. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Bogor.
- Mairi, Rizani., Syamsiar Syamsuddin, & soesilo Zhauhar. 2014. Performance Accountability of Local Government (Case study on Presentation of Performance Accountability Report and Budget Reports on Office of Management of Regional Revenue, Financial and Assets in Hulu Sungai Selatan Regency). *ISSN* 2224 – 5731. 4(8) 156-166.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. 2(1) : 2-45.
- Mahmudi . 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Kedua Yogyakarta : UUP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad Firdiansyah Adiwirya. 2015. Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 11(2) : 1-16.
- Nana Sudjana, 2009. Penilaian Hasil proses Belajar mengajar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pertiwi, Debi putri. 2015. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah *jurnal kebangsaan* . 2 (2) : 1-15.
- Rahum, Abu. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Ejournal Ilmu pemerintahan*. 3(4) : 1523-1636.
- Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah., Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Pratolo, Suryo. 2008. Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Hubungannya Dengan Perwujudan Keadilan Dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur Dan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah. *jurnal akuntansi* 9(2) : 108-124.